

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah I ini bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam periode 5 tahun mendatang. Program-program tersebut, merupakan upaya-upaya yang akan ditempuh pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan Walikota dan Wakil Walikota. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka dalam implementasinya secara operasional, program-program yang telah dirumuskan harus dijabarkan kedalam urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sekaligus ditentukan Perangkat Daerah yang menjadi penanggung jawab dari setiap program tersebut, sehingga dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas Perangkat Daerah dalam melaksanakan rencana pembangunan yang telah disusun dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota.

Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah disusun dengan tujuan untuk menggambarkan keterkaitan bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang *inherent*. Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, kebijakan umum dibuat dalam empat perspektif sesuai strateginya, sebagai berikut:

1. Kebijakan pada **perspektif masyarakat/layanan** adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.
2. Kebijakan pada **perspektif proses internal** adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses

penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.

3. Kebijakan pada **perspektif kelembagaan** yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.
4. Kebijakan pada **perspektif keuangan** yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Setelah kebijakan umum dibuat, langkah selanjutnya adalah merumuskan program pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang mendefinisikan tujuan strategis dalam 5 (lima) tahun. Program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan daerah dapat berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program kepala daerah terpilih yang didalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis.

7.1.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan untuk Misi 1 :

Tabel 7.1
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
UNTUK MISI 1 (MENGEMBANGKAN DAN MEMBERDAYAKAN PARTISIPASI BERBAGAI POTENSI PEMANGKU KEPENTINGAN
(PEMERINTAH, DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT).

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan 1 : Meningkatkan sinergitas pemerintah dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan									
1	Meningkatnya pembangunan fisik yang merupakan hasil keterpaduan antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	1. Menumbuh kembangkan sinergi dan kepedulian pelaku pembangunan	1. Melaksanakan program terpadu yang melibatkan dunia usaha, masyarakat 2. Melaksanakan kegiatan bulan bakti gotong royong bersama masyarakat dan dunia usaha	Peningkatan Jumlah Bantuan swadaya masyarakat, dunia usaha dalam pembangunan	72	72	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat dan desa Pemberdayaan Masyarakat dan desa	Kantor PMPKN, Kecamatan Kantor PMPKN, Kecamatan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		2. Meningkatkan pemanfaatan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk penunjang Program pembangunan	3. Melakukan Koordinasi dana kerjasama dengan dunia usaha 4. Menyusun regulasi tentang pemanfaatan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Persentase Perusahaan /dunia Usaha yang berpartisipasi membiayai Program Pemerintah Daerah Dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan.	70	90	Program Kerjasama Pembangunan	Fungsi Penunjang urusan	Bappeda
Tujuan 2 : Meningkatkan aktifitas generasi muda dalam penggalan potensi diri (seni, budaya dan olahraga)									
2	Meningkatnya event generasi muda dalam pemberdayaan kesenian, adat dan budaya	1. Meningkatkan apresiasi terhadap lembaga seni, adat dan budaya 2. Meningkatkan aktifitas kesenian, adat dan budaya	1. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dengan lembaga kemasyarakatan di bidang seni, adat dan budaya. 2. Melaksanakan event kesenian, adat dan budaya	Event kesenian, adat dan budaya bagi generasi muda	52	65	Program pengelolaan Keragaman Budaya	Urusan Kebudayaan	Dinas Budpar

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		3. Meningkatkan pemanfaatan kekayaan budaya lokal untuk pemberdayaan masyarakat	3. Mengadakan pembinaan kepada sanggar seni, adat dan budaya	Sanggar seni yang aktif	7	25	Program Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan Budaya	Urusan Kebudayaan	Dinas Budpar
3	Meningkatnya event olahraga generasi muda/kepemudaan	1. Meningkatkan apresiasi terhadap event olahraga	1. Meningkatkan event olahraga bagi generasi muda/kepemudaan	Jumlah Event keolahragaan bagi generasi muda	6	18	Program Pembinaan dan Pemasarakatan olahraga	Urusan kepemudaan dan olah raga	Dinas Dikdispora
			2. Meningkatkan sarana dan prasara olahraga				Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Urusan kepemudaan dan olah raga	Dinas Dikdispora
Tujuan 3 : Meningkatkan fungsi rumah ibadah untuk penguatan iman dan taqwa bagi generasi muda									
4	Meningkatnya fungsi rumah ibadah	1. Membudayakan gerakan kembali ke mesjid 2. Menggali potensi generasi	1. Mengadakan pembinaan kepada, anak-anak dan remaja mesjid 2. Membudayakan	Kelompok/organisasi Remaja yang aktif dalam bidang keagamaan Jumlah Event	5	24	Program Peningkatan Kulaitas Pemahaman dan pengamalan	Fungsi penunjang Urusan	Setda/Kesra /Kecamatan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		muda di bidang agama	gerakan magrib mengaji 3. Meningkatkan aktifitas remaja di rumah ibadah untuk penguatan iman dan taqwa.	keagamaan	3	15	agama dan pembinaan kerukunan beragama		

7.1.2 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan untuk Misi 2

Tabel 7.2.

**KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SERTA INDIKASI PROGRAM PRIORITAS BESERTA PAGU PENDANAAN
MISI 2 (MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL
DAN MEMPUNYAI JIWA KEWIRAUSAHAAN)**

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan 1 : Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan memiliki jiwa kewirausahaan dalam tata kelola pemerintahan									
1	Meningkatnya kapabilitas lembaga pemerintahan	1. Penguatan kebijakan dan implementasi sistim pengembangan karir ASN secara transparansi dan berbasis kompetensi	1. Meningkatkan kapasitas komptensi aparatur	% pegawai yang memiliki kompetensi sesuai jabatan	50%	90%	Program pendidikan kedinasan	Fungsi penunjang Urusan	BKD
		2. Peningkatan pelaksanaan manajemen ASN	2. Mengevaluasi dan menganalisa jabatan dan beban kerja	Capaian kinerja daerah (LPPD, SAKIP)	LPPD RANKING 65, LKIP C	LPPD RANKING 30, LKIP A	Program peningkatan profesionalisme SDM aparatur	Fungsi penunjang Urusan	BKD
		3. Meningkatkan kualitas	3. Menerapkan sistim reward dan Punishment yang adil				Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Fungsi penunjang Urusan	BKD Setda/Organisasi /BKD

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		perencanaan yang komprehensif dan aplikatif	4. Menyusun standar Operasional prosedur dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 5. Sinkronisasi dan sinergitas dokumen perencanaan 6. Menyiapkan data dan informasi pembangunan yang valid dan akurat				Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program perencanaan pembangunan daerah	Fungsi penunjang Urusan Fungsi penunjang Urusan Fungsi penunjang Urusan	Setda Bappeda Dishubkominfo Setda Bappeda Dishubkominfo Bappeda
		4. Menumbuhkan kembangkan jiwa kewirausahaan dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan	7. Menyusun regulasi tentang inovasi pelayanan publik 8. Meningkatkan intensitas kajian inovasi pelayanan publik		1	6	Program pengembangan data /informasi/statistik daerah Program Peningkatan dan	Fungsi penunjang Urusan Fungsi penunjang	Setda/Bappeda Dishubkominfo

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
			9. Menyusun regulasi tentang inovasi pelayanan publik 10. Meningkatkan kompetensi aparatur untuk menciptakan inovasi pelayanan publik				Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Pelayanan Publik	Urusan Fungsi penunjang Urusan	DPKAD Setda/Organisasi
		5. Meningkatkan intensitas koordinasi dan kemitraan dengan lembaga legislatif	11. Menetapkan program pembuatan peraturan daerah (Perperda)	% capaian program pembentukan peraturan daerah	19	10	Program Peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD Program penataan peraturan perundang undangan	Fungsi penunjang Urusan Fungsi penunjang Urusan	DPRD Setda/Hukum
		Tujuan 2 : Mewujudkan reformasi birokrasi							

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
2	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	1. Meningkatkan karakter SDM aparatur pengelola pembangunan yang terintegrasi dalam sistim birokrasi yang tertata rapi sesuai dengan azaz tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih 2. Meningkatkan sinergitas antara pengawasan internal, ekstrenal dan penegak hukum.	1. Meningkatkan sistim pengawasan internal 2. Meningkatkan zona integritas wilayah bebas korupsi 3. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah (KDH) Program peningkatan pengembangan dan pengelolaan aset daerah	Fungsi penunjang Urusan Fungsi penunjang Urusan	Inspektorat DPKAD
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 2. Pelimpahan sebahagian kewenangan ke	1. Memenuhi sarana dan prasarana pendukung 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks kepuasan layanan publik	30%	80%	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Peningkatan	Fungsi penunjang Urusan Fungsi penunjang	BKD Inspektorat

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		Kecamatan dan kelurahan 3. Meningkatkan inovasi pelayanan publik 4. Menyiapkan dokumen perencanaan yang konsisten, komperensif terukur dan aplikatif berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan					Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Urusan	

7.1.3 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan untuk Misi 3

Tabel 7.3

**KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SERTA INDIKASI PROGRAM PRIORITAS BESERTA PAGU PENDANAAN
MISI 3 (MENINGKATKAN PEMBANGUNAN, PENATAAN, DAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KOTA SECARA TERPADU BERWAWASAN LINGKUNGAN)**

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan 1 : Meningkatkan Pembangunan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan									
1	Terpenuhinya RTH Kota	1. Membangun dan mengembangkan taman kota (taman tematik dan hutan kota) yang dapat dijadikan taman rekreasi 2. Optimalisasi Penataan Ruang Kota	1. Penyediaan dan pembelian lahan/tanah untuk penyediaan RTH 2. Pembebasan lahan privat yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai ruang terbuka hijau 3. Mendorong penyediaan RTH yang mencukupi dan memadai (jalur hijau pada jaringan jalan,	% RTH Publik % RTH Private	8% 5,50%	17% 10%	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Program Peningkatan kualitas dan	Lingkungan Hidup Fungsi penunjang Urusan Lingkungan Hidup	DKP DINAS PU Kantor LH Setda/Bagian Pemerintahan/ Bagian Hukum Kantor Lingkungan Hidup

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3. Penegakan regulasi penyediaan RTH Privat	sempadan sungai, gedung perkantoran dan fasilitas publik lainnya). 4. Mendorong masyarakat untuk ikut berperan dalam peningkatan RTH Privat 5. Penyempurnaan dan Penerapan regulasi untuk penyediaan RTH privat				akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas PU
2	Fasilitas Publik yang memenuhi standar lingkungan	4. Melengkapi sarana dan prasarana fasilitas publik yang lebih representatif memenuhi standar lingkungan	1. Menyiapkan regulasi yang mendukung pemenuhan sarana prasarana fasilitas publik yang berwawasan lingkungan 2. Pengawasan dan pengendalian	% fasilitas sosial yang representative dan memenuhi standar lingkungan % Fasum yang representative dan memenuhi standar lingkungan	75% 55%	90% 85%	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup,

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			pembangunan fasilitas public 3. Membangun sarana prasarana kota pendukung smart city 4. Penegakan hukum						
3	Pemenuhan target universal access (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)	1. Pengembangan sistem air minum perpipaan 2. Penataan kawasan permukiman kumuh	1. Meningkatkan kualitas jaringan pipa air bersih 2. Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air minum. 3. Meningkatkan sarana dan prasarana air minum yang aman dan sehat 4. Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas/sarana penunjang (PSU)	Penyediaan air minum layak Kawasan Kumuh	93 -	100 0	Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Program Pengembangan Perumahan	Pekerjaan umum dan penataan ruang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3. Pengembangan rumah susun sewa	kawasan 5. Penataan rumah yang layak huni 6. penyelenggaraan penataan lingkungan perumahan pemukiman berbasis masyarakat 7. perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya)	% sanitasi layak	95	100	Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	pekerjaan umum dan penataan ruang Perumahan rakyat dan kawasan permukiman Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan/ PDAM KLH

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4. Ketersediaan sarana prasarana sanitasi dasar 5. Penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 6. Penurunan beban pencemaran Batang Agam	8. mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase/intercity connection 9. Memperkuat kelembagaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)/ Pokja Sanitasi 10. Normalisasi Batang Agam 11. Mengembangkan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat 12. Meningkatkan cakupan layanan air				Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program Peningkatan pengendalian polusi Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Program pengendalian banjir	Pekerjaan umum dan penataan ruang pekerjaan umum dan penataan ruang pekerjaan umum dan penataan ruang pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			limb 13. ah melalui pembangunan perpipaan dan IPAL terpusat 14. mendorong pengolahan air limbah domestik permukiman melalui pembangunan IPAL Komunal dan IPLT standar lingkungan hidup 15. mengembangkan gerakan sungai bersih 16. Penegakan perda sampah				Program pengendalian banjir	pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum
Tujuan 2 : Peningkatan Penataan Ruang Kota									
1	Pengendalian dan Pemanfaatan	1. Pengembangan sistem	1. Menerapkan sistem informasi dan data	Kesesuaian pemanfaatan ruang	55%	70%	Program Pengendalian	Pekerjaan Umum dan	Dinas Pekerjaan Umum

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ruang Kota	informasi dan data spasial	spasial berbasis web	kota			Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang	
		2. Optimalisasi penegakan Perda Tata Ruang	2. Optimalisasi peran dan fungsi PPNS 3. Penyempurnaan regulasi rencana tata ruang beserta turunannya.	Pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan	50%	80%	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum
Tujuan 3 : Menjadikan Bukittinggi sebagai kota Pusaka Nasional dan Dunia									
1	Meningkatkan pelestarian benda cagar budaya (BCB)	1. Revitalisasi kawasan yang memiliki BCB	1. Memberikan bantuan pemugaran BCB	jumlah pembenahan bangunan bernilai sejarah, adat, budaya dan agama	1	6	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	Dinas kebudayaan dan pariwisata
2	Pembangunan dan pengembangan bangunan bersejarah, adat dan agama	2. Membangkitkan rasa kebanggaan terhadap kedaerahan melalui pembangunan rumah khas daerah minangkabau 3. Bukittinggi	2. Memberikan insentif terhadap pembangunan rumah adat 3. Meningkatkan kerjasama dengan balai pelestarian cagar budaya 4. Pemugaran dan pembangunan kembali bangunan				Pengelolaan keragaman budaya	Kebudayaan	Dinas kebudayaan dan pariwisata
							Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Program Penyelamatan	Kebudayaan Kearsipan	Dinas kebudayaan dan pariwisata Kantor Perpustakaan,

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		sebagai Ibu Kota PDRI 4. Pengawasan BCB	cagar budaya, adat dan agama yang memiliki nilai sejarah 5. Mengusahakan pengakuan pemerintah, Bukittinggi sebagai Kota Perjuangan 6. Membangun monumen sejarah bukti Bukittinggi sebagi Ibukota PDRI 7. Dokumentasi sejarah PDRI di Bukitinggi				dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah		arsip dan dokumentasi daerah Kearsipan Kantor Perpustakaan, arsip dan dokumentasi daerah
Tujuan 4 Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu									
1	Terciptanya keamanan, keselamatan,	1. pengembangan sarana dan prasarana	1. Meningkatkan sarana prasarana sistem transportasi	Cakupan Daerah yang terlayani angkutan umum	81%	86%	Program Peningkatan pelayanan	Perhubungan	Dishubkominfo

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ketertiban dan kelancaran berlalu lintas	pendukung sistem transportasi 2. Penataan Angkutan Umum Reguler 3. Penataan sistem transportasi 4. Penataan sistem perparkiran	2. Pengembangan kawasan pendestrian 3. Melaksanakan rekayasa lalu lintas 4. Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan transportasi/intercity connection 5. Pengendalian dan keselamatan transportasi 6. Penyusunan dan penegakan Regulasi yang terkait dengan perhubungan dan lalu lintas 7. Pengembangan pedestrian 8. Menyediakan data base perhubungan 9. Pengembangan dan pemeliharaan Area	Fasilitas Keselamatan Jalan Jalan berkondisi baik	71% 86%	76% 95%	angkutan Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Perhubungan Perhubungan Perhubungan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo Dinas Pekerjaan Umum

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Trafic Control System						
			10. Menata kawasan perparkiran						
			11. Menghapuskan terminal bayangan untuk angkot dan angdes						
		5. pengembangan prasarana jalan dan pendukungnya	12. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan				Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum
			13. Aktualisasi data jalan dan leger jalan						
		6. pembatasan tonase kendaraan sesuai dengan kelas jalan sehingga fungsi jalan dapat maksimal sesuai dengan umur rencana	14. Menjalinkan kerjasama dengan instansi vertikal teknis yang ada di daerah untuk pemeliharaan jalan dan pendukungnya				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum
							Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan 5 : Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga pemerintahan terhadap bencana									
1	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga pemerintahan terhadap bencana	1. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya pengurangan resiko bencana 2. penguatan kelembagaan pemerintah dalam menangani bencana	1. Menyiapkan tenaga terlatih berbasis masyarakat 2. Melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Fasilitas Kebencanaan	60%	90%	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	fungsi penunjang Urusan	BPBD

7.1.4 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan untuk Misi 4

Tabel 7.4

**KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SERTA INDIKASI PROGRAM PRIORITAS BESERTA PAGU PENDANAAN
MISI 4 (MENGEMBANGKAN SISTEM EKONOMI PERKOTAAN SECARA LEBIH BERDAYA GUNA)**

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan 1 : Meningkatkan peran koperasi dan UMK dalam menunjang perekonomian kota									
1	Berkembangnya koperasi	1. Peningkatan kapasitas SDM pengurus dan karyawan koperasi 2. Peningkatan kepatuhan koperasi terhadap aturan perundang-undangan tentang perkoperasian 3. Meningkatkan kontribusi dan berkembangnya koperasi dan	1. Meningkatkan keterampilan teknis pengelolaan manajemen keuangan koperasi 2. Meningkatkan pengawasan terhadap koperasi 3. Meningkatkan kualitas kelembagaan, perlindungan, dukungan usaha bagi koperasi dan UMKM 4. Meningkatkan koordinasi dengan Dekopin	Jumlah Koperasi sehat	12	17	Program Peningkatan Kualitas kelembagaan koperasi	Koperasi dan UKM	Dinas Koperindag

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		UMKM 4. Mendorong peningkatan peran dan fungsi Dekopin dalam membina Koperasi							
2	Berkembangnya usaha mikro	5. Peningkatan skala usaha mikro	5. Meningkatkan kapasitas SDM, pengelolaan usaha dan keuangan usaha mikro 6. Membentuk dan memberdayakan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) UMKM	Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha Kecil	5	105	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM	Koperasi dan UKM	Dinas Koperindag
Tujuan 2 : Mewujudkan perekonomian yang sehat									
3	Berkembangnya investasi	1. Mendorong berkembangnya penanaman modal di berbagai sektor	1. menggunakan teknologi informasi dalam pelayanan penanaman modal 2. Melaksanakan	Jumlah Investasi	1.884	3.035	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Penanaman Modal	BP2TPM

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		2. Meningkatkan iklim investasi melalui harmonisasi dan penyederhanaan regulasi yang mengatur tentang Penanam Modal (Kemudahan dalam berinvestasi)	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal 3. Memberikan insentif dalam penanaman modal 4. Memfasilitasi Koperasi dan UMKM untuk bermitra dengan pengusaha PMA/PMDN;				Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Program penyiapan potensi sumber daya sarana dan prasarana daerah	Penanaman Modal Penanaman Modal	BP2TPM BP2TPM
							Program Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Penanaman Modal	BP2TPM
4	Berkembangnya Industri Kecil Menengah	3. Memperluas akses berusaha bagi masyarakat dan meningkatkan	5. Memfasilitasi kemudahan akses dan perizinan permodalan bagi Industri Kecil	Jumlah Industri Kecil Menengah yang berkembang (tenaga kerja, modal dan	5	40	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Industri	Dinas Koperindag

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		produk dan promosi offline dan online 8. Peningkatan peran industri kecil menengah, sentra industri potensial dan industri kreatif yang berwawasan lingkungan	mendukung produktivitas IKM 11. Menyusun regulasi tentang penanaman modal						
Tujuan 3 : Meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat									
5	Meningkatnya lapangan kerja	1. Peningkatan daya saing (keterampilan dan kualitas) tenaga kerja sesuai dengan kompetensi 2. Mengupayakan hubungan industrial harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan	1. Memberikan kesempatan memperoleh pelatihan, peningkatan kompetensi kerja dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan pelatihan kreativitas bagi para pencari kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,84	4.93	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Ketenagakerjaan	Dinas Sosnaker

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja	2. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja.						
		3. Meningkatkan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja.	3. Mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan memfasilitasi wirausaha pemula. 4. Mengupayakan penciptaan lapangan pekerjaan baru..				Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Ketenagakerjaan	Dinas Sosnaker
Tujuan 4 : Meningkatkan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan									
6	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah	1. Membangun Sistem Pengawasan Pajak dan retribusi Sebagai Sistem Pengendalian Internal Yang Handal	Jumlah penerimaan pajak daerah	34.758.804.463	54.400.227.101	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Fungsi Penunjang Uusan	DPKAD

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
			2. Menerapkan sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah berbasis TIK. 3. Melakukan riset/kajian potensi penerimaan PAD						

7.1.5 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan untuk Misi 5

Tabel 7.5

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SERTA INDIKASI PROGRAM PRIORITAS BESERTA PAGU PENDANAAN MISI 5 (MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA SERTA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASAYARAKAT).

N O	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan 1 : Mewujudkan pariwisata yang berdaya saing									
1	Meningkatnya kunjungan wisatawan	1. Optimalisasi pemasaran pariwisata yang kreatif, efektif dan terpadu	1. Pemasaran pariwisata melalui pemanfaatan media cetak dan elektronik serta website dan melaksanakan event kepariwisataan (berskala lokal, nasional dan internasional)	Jumlah kunjungan wisatawan	483.950	617.657	Program engembangan pemasaran pariwisata	Pariwisata	Budpar
		2. Mengembang kan pariwisata MICE (Meetings,	2. Menyediakan dan memfasilitasi pengembangan sarana prasarana				Program Pengembangan kemitraan	Pariwisata	Budpar

N O	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		<p>Incentives, Convergence, Exhibitions) dan ekowisata berbasis kearifan budaya minang.</p> <p>3. Penguatan dan pengembangan destinasi pariwisata hospitality dan sapta pesona serta standarisasi usaha pariwisata</p> <p>4. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata</p>	<p>utama dan pendukung bagi pengembangan pariwisata MICE</p> <p>3. Menciptakan objek wisata baru</p> <p>4. Mengembangkan desa/kampung wisata dan daya tarik wisata yang hospitality dan sapta pesona serta pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata</p> <p>5. Merevitalisasi daya tarik wisata dan mengembangkan agro wisata dan wisata minat khusus</p> <p>6. Menyusun rencana induk pengembangan pariwisata daerah</p>				Program pengembangan destinasi wisata	Pariwisata	Dinas Budpar

N O	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
			(RIPPDA)						
Tujuan 2 : Mewujudkan pendidikan yang berdaya saing									
2	Meningkatnya mutu pendidikan	1. Meningkatkan pendidikan anak di usia dini 2. Meninjau Ulang regulasi pendidikan 3. Mewujudkan rintisan Wajar 12 tahun 4. Mengorientasi kan pendidikan terhadap MEA 5. Memfasilitasi pendirian perguruan Tinggi 6. Memenuhi 8	1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang PAUD 2. Memberikan beasiswa kepada siswa miskin 3. Meningkatkan peran serta msayarakat (dewan pendidikan) 4. Memberikan pembekalan kepada peserta didik dalam menghadapi MEA. 5. Melakukan pemerataan	Harapan lama sekolah Angka Rata Rata Lama Sekolah APK PAUD (3 - 6 TH)	14,7 10,85 86%	15 11,20 88,50%	Program Pendidikan bagi anak usia dini Program Wajib belajar 9 tahun Program pendidikan Menengah Program Pendidikan Luar Biasa Program pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan	Pendidikan Pendidikan Pendidikan Perpustakaan	Disdikpora Disdikpora Disdikpora KPAD

N O	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		standar pendidikan bagi semua tingkat pendidikan	sebaran siswa ke seluruh sekolah sesuai rayon/sistim online				Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidikan	Disdikpora
		7. Mendorong masyarakat Kota Bukittinggi untuk menempuh pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi	6. Meningkatkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di semua tingkat pendidikan 7. Menyiapkan pola ruang untuk pendirian perguruan tinggi 8. Membudayakan dan memfasilitasi gerakan satu sarjanan satu keluarga.	Angka Putus sekolah Jenjang SD, SMP	0,22%	0,04%	Program pendidikan Non Formal	Pendidikan	Disdikpora
				% Sekolah yang berakreditasi A tingkat SD	72,88%	81,35%			
				% Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMP	54,50%	90,90%			

N O	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
				% Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMA % Kompetensi keahlian yang berakreditasi A tingkat SMK	63,60%	90,90%			
3	Terwujudnya pengintegrasian nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam pendidikan	8. Melengkapi mata pelajaran Muatan Lokal dengan agama, adat dan lingkungan hidup berbasis budaya lokal	9. Menyusun Silabus Mata pelajaran Muatan Lokal dengan agama, adat dan budaya yang berkesinambungan	Jumlah Mata Pelajaran Muatan Lokal pendidikan karakter berbasis adat dan budaya minangkabau	0	1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Pendidikan	Disdikpora
Tujuan 3 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat									
4	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	1. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan Ibu, anak, remaja dan lanjut usia yang berkualitas	1. Memperkuat upaya promotif dan preventif 2. Penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan (continuum of care) 3. Intervensi berbasis resiko kesehatan	Angka Harapan Hidup Puskesmas yang terakreditasi Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan	72,36 2 81%	73,14 4 95%	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program perbaikan Gizi Masyarakat Program Pencegahan dan	Kesehatan Kesehatan Kesehatan	DKK DKK DKK

N O	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		2. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat	4. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah	Masyarakat			penanggulangan penyakit menular	Kesehatan	DKK
		3. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan serta produk pertanian					Program Pengembangan Lingkungan Sehat		
		4. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan					Program Promosi Kesehatan	Kesehatan	DKK
		5. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaa n masyarakat					Pemberdayaan Masyarakat		
		6. Meningkatkan					Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	DKK
							Program Pengadaan peningkatan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya		

N O	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		n ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas farmasi dan alat kesehatan 7. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan berkualitas					Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/Rumah sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah sakit Mata	Kesehatan Kesehatan Kesehatan	DKK DKK DKK
Tujuan 4 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat									
5	Meningkatnya kualitas penduduk pembangunan keluarga, pengarusutamaan	1. Mengefektifkan program keluarga berencana	1. Meningkatkan intensitas dan kuantitas program KB 2. Melibatkan elemen	Laju Pertumbuhan Penduduk Tingkat Kemiskinan	1,71 4,23	1,38 2,84	Program Keluarga Berencana Program	Pengendalian Penduduk/KB Pengendalian	Bappeda/ PPKB Kantor PPKB

N O	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
	gender dan perlindungan anak	2. Meningkatkan kualitas perempuan dan anak	masyarakat dalam menyukseskan program KB				penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender	Penduduk/KB	
				Indek Pemberdayaan gender	70,84	75,84	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Pengendalian Penduduk/KB	Kantor PPKB
				Capaian PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial dalam usaha meningkatkan kualitas penduduk.	80%	88%	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pengendalian Penduduk/KB	Kantor PPKB
		3. Tertib administrasi kependudukan.	3. Meningkatkan intensitas pengawasan terhadap administrasi kependudukan				Program penataan Administrasi kependidikan	Kependudukan	Dinas Dukcapil
		4. Intervensi dan	4. Meningkatkan				Program	Sosial	Dinas Sosnaker

N O	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		sinergi program penanggulangan kemiskinan basis data terpadu (BDT) 5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengurangan dan pemberdayaan PMKS	program bantuan sosial yang tepat sasaran 5. Meningkatkan peran serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PMKS) dalam mengurangi dan pemberdayaan PMKS				pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya		DKK Bappeda
Tujuan 5 : Mewujudkan pusat perdagangan dan jasa yang berdaya saing									
6	Meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan	1. Pengembangan pasar tradisional dengan memfasilitasi lokasi untuk PKL	1. Revitalisasi pasar tradisional yang terintegrasi dengan penataan PKL dan perpajakan untuk menciptakan kawasan	Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	2.338	4.229	Program Peningkatan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Program Pembinaan	Perdagangan Perdagangan	Dinas Pengelolaan Pasar Dinas Koperindag

N O	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
			perdagangan yang kondusif, tertib dan teratur				pedagang kaki lima dan asongan		
		2. Menjaga stabilitas ketersediaan dan distribusi barang kebutuhan pokok 3. Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen 4. Meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri untuk membatasi penggunaan produk impor	2. menjaga keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang 3. Pengembangan UPT kemetrolagian daerah 4. Melaksanakan pengawasan terhadap barang beredar 5. Meningkatkan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen dan menyelesaikan permasalahan pengaduan konsumen 6. Menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya 7. Meningkatkan konsumsi produk				Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Perdagangan	Dinas Koperindag

N O	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
			dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga melalui sosialisasi dan peningkatan citra produk dalam negeri						
Tujuan 6 : Meningkatkan penganeekaragaman konsumsi pangan dan gizi									
1	Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang bergizi, beragam, seimbang dan aman berbasis sumberdaya local	Pengembangan dan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal	Penerapan menu beragam, bergizi, sehat, aman dan halal	Skor pola pangan harapan (PPH)	84,1	85,2	Program peningkatan diversifikasi pangan	Ketahanan Pangan	Kantor Ketahanan Pangan
Tujuan 7 : Meningkatkan Ketertiban, Ketentraman dan Keamanan Kota									
7	Terkendalnya Stabilitas Keamanan, Ketentraman dan ketertiban umum	1. Mengintensifkan operasional Keamanan, ketentraman dan	1. Meningkatkan koordinasi dan pelibatan instansi terkait. 2. Meningkatkan sosialisasi perda	Jumlah kasus pelanggaran gangguan Ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat yang	650	250	Program Pemeliharaan Keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan	ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Satpol PP

N O	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		Ketertiban umum 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan.	3. Penguatan kelembagaan masyarakat	tertangani			pencegahan tindak kriminal Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum	ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Satpol PP

7.2 ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH

Berdasarkan Peraturan daerah Kota Bukittinggi nomor 6 tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi, telah ditetapkan rencana struktur ruang wilayah, yang diwujudkan berdasarkan arahan rencana pusat-pusat pelayanan kota, dan rencana sistem prasarana wilayah kota. Pengembangan Pusat Pelayanan Kota terdiri atas Pusat Pelayanan Kota Fungsi Primer dan Pusat Pelayanan Kota Fungsi Sekunder. Pengembangan Pusat Pelayanan Kota Fungsi Primer, merupakan pusat pelayanan yang jangkauan pelayanannya meliputi seluruh wilayah kota dan/atau regional. Pengembangan Pusat Pelayanan Kota Fungsi Sekunder, merupakan pusat pelayanan yang jangkauan pelayanannya meliputi seluruh wilayah Kota Bukittinggi.

Pengembangan Pusat Pelayanan Kota Fungsi Primer meliputi kawasan Pasar Atas, kawasan Simpang Aur. Kawasan Pasar Atas adalah kawasan yang telah tumbuh dan menjadi ciri khas tersendiri di Kota Bukittinggi. Pengembangan Kawasan Pasar Atas dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi pelayanan dalam skala kota hingga regional, kawasan perdagangan dan jasa skala kota dan regional, kawasan perumahan kepadatan tinggi dan ruang terbuka hijau skala perkotaan dalam bentuk taman kota dan jalur hijau jalan.

Kawasan Simpang Aur adalah kawasan yang akan ditumbuh kembangkan di Kota Bukittinggi sebagai counter magnet terhadap perkembangan kegiatan yang saat ini masih terkonsentrasi di Kawasan Pasar Atas. Pengembangan Kawasan Simpang Aur dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi pelayanan dalam skala kota hingga regional.

Pengembangan Pusat Pelayanan Kota Fungsi Sekunder diarahkan pada kawasan Gulai Bancah dan kawasan Belakang Balok. Kawasan Gulai Bancah merupakan kawasan pusat pemerintahan baru yang dilalui oleh dua jalan arteri primer dan arteri sekunder serta memiliki keterhubungan langsung dengan kawasan pusat kota Benteng Pasar Atas. Pengembangan Kawasan Gulai Bancah dilakukan berdasarkan pada fungsi-fungsi yang telah berkembang di kawasan ini, meliputi kawasan pusat pemerintahan kota, kawasan sosial budaya dengan keberadaan gedung perpustakaan Bung Hatt, ruang terbuka hijau berbentuk pemakaman untuk skala kota dan kawasan permukiman kepadatan sedang beserta fasilitas pendukungnya.

Kawasan Belakang Balok merupakan kawasan yang berada pada pintu gerbang Kota Bukittinggi dari arah selatan serta terhubung langsung dengan Kawasan Pusat Kota Benteng Pasar Atas oleh jaringan jalan arteri sekunder, sehingga memiliki hubungan kuat dengan pusat kota. Pengembangan Kawasan Belakang Balok dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi pada kawasan yaitu kawasan perkantoran pemerintahan skala kota, kawasan pusat pelayanan pendidikan menengah dan tinggi serta pusat pelayanan

kesehatan skala kota, kawasan perumahan berikut fasilitas pendukungnya, kawasan perdagangan dan Jasa skala kota dan pengembangan ruang terbuka hijau skala kota.

Sub Pusat Pelayanan Kota merupakan sub pusat pelayanan yang diarahkan dengan fungsi pelayanan skala kota. Kawasan yang diarahkan sebagai sub pusat pelayanan kota, meliputi: a. kawasan Campago Ipuh; b. kawasan Garegeh; dan c. kawasan Ladang Cakiah.

Kawasan Campago Ipuh merupakan kawasan pengembangan baru yang berfungsi untuk menarik perkembangan kota ke arah utara sehingga mengurangi beban pelayanan Kawasan Pusat Kota. Pengembangan Kawasan Campago Ipuh dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi kawasan, meliputi pusat pelayanan umum dan sosial, meliputi pendidikan menengah, rekreasi skala sub wilayah kota, perdagangan dan jasa koridor skala sub wilayah kota kawasan olahraga skala sub wilayah kota;

Kawasan Garegeh merupakan kawasan yang berada di Jalan Sukarno Hatta serta terletak pada perbatasan kota dengan Kabupaten Agam yang merupakan pusat kegiatan perumahan perkotaan. Pengembangan kawasan Garegeh dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi yang diarahkan pada kawasan perdagangan dan jasa skala sub wilayah kota, RTH rekreasi skala sub wilayah kota, kawasan olahraga skala sub wilayah Kota, pendidikan tingkat menengah dan kesehatan skala puskesmas pembantu, perumahan berkepadatan sedang dan fasilitas pendukungnya.

Kawasan Ladang Cakiah merupakan kawasan yang berada di Jalan Tigo Baleh serta terletak pada perbatasan kota dengan Kabupaten Agam merupakan kegiatan permukiman perkotaan. Pengembangan kawasan Ladang Cakiah dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi yang diarahkan pada kawasan perdagangan dan jasa skala sub wilayah kota RTH rekreasi skala sub wilayah kota, pendidikan tingkat menengah dan kesehatan skala puskesmas pembantu, perumahan berkepadatan sedang dan fasilitas pendukungnya. Pusat Pelayanan Lingkungan merupakan pusat pelayanan unit lingkungan untuk dikembangkan sebagai pusat pelayanan yang berorientasi pada kegiatan sosial budaya di kawasan perumahan

Selanjutnya kondisi saat ini rencana struktur ruang wilayah dimaksud yang dijabarkan dalam Perda Nomot 6 tahun 2011 tersebut, sedang dalam revisi. Jika telah ditetapkan perubahan Perda nomor 6 Tahun 2011, maka tentunya rencana struktur ruang wilayah akan mengalami perubahan dan harus disesuaikan kembali.

7.3. ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH TETANGGA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam nomor 13 tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam 2011-2031, Struktur Ruang Kabupaten Agam didasarkan pada pertimbangan penggunaan lahan eksisting, perbedaan fisiografi wilayah dan aksesibilitas serta onentasi pergerakan wilayah maka ditetapkan struktur wilayah pembangunan Kabupaten Agam yaitu Rencana Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Rencana Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP) dan Rencana Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan. Untuk daerah yang berbatasan dengan Kota Bukittinggi masuk dalam Rencana Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan yaitu :

Kebijakan Kegiatan Perkotaan di Kecamatan Ampek Nagari dipusatkan di Bawan sebagai ibukota kecamatan, sekaligus berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dengan fungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan kegiatan sosial skala kecamatan, pusat koleksi dan distribusi barang dan jasa dari wilayah hinterlandnya, Wilayah Kecamatan palembayan bagian barat, pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pengembangan kota diarahkan memiliki keterkaitan dengan pengembangan Kota Lubuk Basung.

Kegiatan perkotaan di Banuhampu lebih berkembang pada kawasan perbatasan dengan Kota Bukittinggi dan koridor utama menuju pusat Kota Bukittinggi diantaranya Nagari Taluak IV Suku, Padang Luar dan Ladang Laweh, disamping ibukota kecamatan di Sungai Buluh. Lebih jauh peran Banuhampu sebagai Pusat Pelayanan Kawasan, adalah sebagai pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan, pusat pelayanan sosial skala kecamatan, sebagai pusat koleksi dan distribusi barang skala wilayah (mencakup Kecamatan Sungai Pua dan IV Koto, sebagian Kecamatan Canduang), pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian hortikultura skala regional di Pasar Padang Luar, sebagai salah satu kawasan penyangga kegiatan pertanian (agropolitan), dan sebagai salah satu Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

Pemusatan kegiatan perkotaan di Kecamatan Sungai Pua adalah di Nagari Sariak yang merupakan ibukota kecamatan Sungai Pua, dengan fungsi perkotaan diarahkan sebagai pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan, pusat pelayanan sosial skala kecamatan, pusat koleksi distribusi hasil produksi barang wilayah hinterlandnya, Pengembangan kota diarahkan memiliki keterkaitan dengan pengembangan Kecamatan Banuhampu, sebagai salah satu kawasan penyangga kegiatan pertanian (agropolitan) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Kegiatan perkotaan di Canduang dipusatkan di Nagari Lasi yang merupakan ibukota kecamatan, fungsi Lasi adalah sebagai pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan, pusat pelayanan sosial skala kecamatan, pusat koleksi distribusi hasil produksi barang

wilayah hinterlandnya (gula merah tebu), sebagai salah satu pusat pengembangan industri konveksi, Pengembangan kota diarahkan memiliki keterkaitan dengan pengembangan Baso, salah satu pusat pengembangan kegiatan pertanian (agropolitan), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Pemusatan kegiatan perkotaan di Kecamatan Ampek Angkek adalah di Biaro sebagai ibukota Kecamatan Ampek Angkek, dengan fungsi perkotaan sebagai pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan, pusat pelayanan sosial skala kecamatan, pusat koleksi distribusi hasil produksi barang skala regional (beberapa kecamatan), salah satu alternatif pengembangan simpul pelayanan transportasi regional, pusat pengembangan industri rumah tangga (konveksi, bordir dan sulaman), salah satu pusat pengembangan kegiatan pertanian (agropolitan), pengembangan kota diarahkan memiliki keterkaitan dengan pengembangan Baso, dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Pemusatan kegiatan perkotaan di Kecamatan Tilatang Kamang adalah di Pakan Kamis sebagai ibukota Kecamatan Tilatang Kamang, dengan fungsi perkotaan sebagai pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan, pusat pelayanan sosial skala kecamatan, pusat koleksi dan distribusi hasil produksi barang skala kecamatan, salah satu pusat pengembangan industri makanan kecil, salah satu kawasan penyangga kegiatan pertanian (agropolitan), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Pemusatan kegiatan perkotaan di Kecamatan Kamang Magek adalah di Kamang Hilir sebagai ibukota Kecamatan Kamang Magek, dengan fungsi perkotaan sebagai pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan, pusat pelayanan sosial skala kecamatan, pusat koleksi dan distribusi hasil produksi barang skala kecamatan, salah satu pusat pengembangan industri makanan kecil, salah satu kawasan penyangga kegiatan pertanian (agropolitan), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Pemusatan kegiatan perkotaan di Kecamatan Baso adalah di Baso sebagai ibukota kecamatan, dengan fungsi perkotaan sebagai pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan, pusat pelayanan sosial skala kecamatan, simpul pelayanan transportasi yang dapat melayani beberapa kecamatan dan nagari di bawahnya, pusat koleksi dan distribusi hasil produksi komoditi pertanian skala wilayah (terutama Kamang Magek, Ampek Angkek dan Canduang, termasuk kecamatan diluar Kabupaten Agam yang berbatasan langsung dengan Baso seperti Kecamatan Aka Biluru (Kabupaten 50 Kota) dan Kecamatan Tanjung Baru (Kabupaten Tanah Datar), salah satu kawasan penyangga kegiatan pertanian (agropolitan), pusat pengembangan pendidikan, dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp).

Pemusatan kegiatan perkotaan di Kecamatan Palupuh adalah di Palupuh sebagai ibukota kecamatan dengan fungsi perkotaan sebagai pusat pelayanan pemerintahan skala

kecamatan, pusat pelayanan sosial skala kecamatan, pusat koleksi dan distribusi hasil produksi barang skala kecamatan, dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).